

**Analisis Evaluasi *Technology Acceptance Model* terhadap
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan *E-Procurement* di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat**

Sarah Hana Fitriyah¹⁾, Dewi Sri Wahyuni²⁾, Aan Julia³⁾*, Nidar Nadrotan Naim⁴⁾.

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung

⁴Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Jawa Barat

Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia

¹sarahftryh@gmail.com, ²swahyunidewi81@gmail.com, ³aan.unisba@gmail.com,

⁴nidar.nns@gmail.com, *corresponding author

ABSTRACT

Government functions require logistics, equipment and services to support optimal government activities by utilizing technology for administrative reform and public services that are transparent and accountable through e-Procurement. However, it turns out that the unpreparedness of human resources in operating e-Procurement affects its effectiveness. This research method is quantitative and descriptive using the Technology Acceptance Model (TAM). The population in this study is the Regional Apparatus/Bureau in West Java, the sample taken is 100 respondents from the Regional Apparatus/Bureau in West Java. The analysis tool uses Partial Least Square SEM using SmartPLS 3.0 software. Based on the results of the study, it is known that human resources who use e-Procurement in the West Java Provincial Government in its application have accepted the presence of e-Procurement even though in its application there are still users who experience difficulties.

Keywords: *e-Procurement, Public Service, Structural Equation Model, Technology Acceptance Model*

ABSTRAK

Fungsi pemerintahan membutuhkan logistik, peralatan dan jasa untuk menunjang optimalnya kegiatan pemerintah. Pemerintah memanfaatkan teknologi untuk reformasi administrasi dan pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas dengan menciptakan *e-Government*. Salah satu contoh penerapan *e-Government* adalah melalui *e-Procurement*. Namun, ternyata ketidaksiapan sumber daya manusia dalam mengoperasikan *e-Procurement* mempengaruhi keefektifan *e-Government*. Metode penelitian ini adalah kuantitatif dan deskriptif dengan menggunakan *Technology Acceptance Model* (TAM). Populasi dalam penelitian ini adalah Perangkat Daerah/Biro di Jawa Barat, sampel yang diambil yakni 100 responden dari Perangkat Daerah/Biro di Jawa Barat. Alat analisis menggunakan *Partial Least Square SEM* (PLS SEM). Peneliti menggunakan *software SmartPLS 3.0*. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa SDM yang menggunakan *e-Procurement* di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat membuktikan dalam penerapannya sudah menerima hadirnya *e-Procurement* meskipun dalam penerapannya masih ada pengguna yang memiliki kesulitan.

Kata kunci: *e-Procurement, Pelayanan Publik, Structural Equation Model, Technology Acceptance Model*

PENDAHULUAN

Pemerintah merupakan badan publik yang memiliki peran penting sebagai lembaga penyedia layanan sipil dan jasa-jasa publik dalam meningkatkan mutu

pelayanan publik demi terciptanya *clean and good governance*. *Good governance* dapat diartikan sebagai prinsip dalam mengatur pemerintahan yang memungkinkan layanan publiknya efisien dan administrasinya bertanggung jawab pada publik (Moento et al., 2019). Pada hakekatnya yang menunjukkan bagaimana fungsi pemerintahan dijalankan adalah dengan disediakannya pemberian pelayanan baik atas barang, jasa dan pelayanan administrasi kepada setiap warga. Fungsi penting pemerintah yaitu sebagai regulasi, proteksi dan sebagai distribusi (Endah, 2018). Dalam menjalankan fungsi pemerintahan tersebut, dibutuhkan logistik, peralatan dan jasa untuk menunjang optimalnya kegiatan pemerintah (Purba, dkk 2020).

Untuk memenuhi berbagai kebutuhan diatas perlu dilakukan melalui tender atau pelelangan salah satunya untuk keperluan kantor sehari-hari yang habis dipakai seperti Alat Tulis Kantor (ATK), pengadaan pergantian inventaris kantor, langganan daya dan jasa, serta pengeluaran bersifat non fisik dalam bentuk Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) (Wardhana, 2016). Tahapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdiri dari, Tahap Perencanaan, Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan dan Tahap Serah Terima Pekerjaan (Azikin et al., 2021). Melalui tahapan tersebut pengajuan PBJ dirancang setiap tahunnya dalam rencana keuangan yang disusun melalui adanya usulan setiap daerah oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah kemudian dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang bertujuan untuk meminimalisir hal merugikan seperti kesalahan, pemborosan, dan penyelewengan dapat dihindari.

Dalam pelaksanaan APBN dan APBD, terdeteksi permasalahan yang seharusnya anggaran tersebut lebih banyak dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan lainnya, justru terkuras di dalam kegiatan PBJ yang tidak efektif dan efisien (Rachmania, 2020). Hal tersebut bisa dilihat dari seringnya terjadi perubahan kebutuhan dalam prosesnya terutama dalam rencana anggaran sistem PBJ yang disebut Rencana Umum Pengadaan (RUP). Akibat sering terjadinya perubahan tersebut, peluang tingkat penyimpangan semakin tinggi. Terdapat 30-50% kebocoran APBN dan APBD seperti praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam kasusnya di Indonesia, sebuah kajian yang dilakukan Bank Dunia (*Country Procurement Assesment Review*) CPAR menyebutkan bahwa 10-50% pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia mengalami kebocoran (korupsi) (*World Bank*, 2001).

Mengantisipasi penyimpangan kebocoran itu, pemerintah memanfaatkan teknologi untuk reformasi administrasi dan pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas dengan menciptakan *e-Government*. *E-Government* dibentuk untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik dengan memberikan pilihan kepada masyarakat untuk mendapatkan kemudahan akses Informasi publik secara *online* (Sari, 2021). Salah satu contoh penerapan *e-Government* yang telah dilakukan pemerintah Indonesia beberapa tahun belakangan ini adalah melalui *e-Procurement*. Hadirnya *e-Procurement* berhasil menekan biaya menjadi lebih murah, pelayanan publik yang lebih baik serta siklus pengadaan yang lebih pendek (LKPP, 2009). Manfaat dari digunakannya *e-Procurement* di Indonesia adalah

semakin baiknya tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah, seperti yang ditegaskan oleh Perpres No. 54 Tahun 2010 Pasal 107. Namun, ternyata dalam penerapan teknologi *e-Procurement* di Indonesia masih ditemukan masalah-masalah krusial yang mempengaruhi keefektifan *e-Government*. Salah satunya yaitu selalu mengalami perubahan/perkembangan pada aplikasinya dari waktu ke waktu yang tidak diiringi oleh peningkatan pemahaman dan pengetahuan sumber daya atas aplikasi tersebut yang membuat para pelaku pengadaan mengalami kesulitan saat mengoperasikan *e-Procurement* karena kurangnya pelatihan secara berkala (Ada et al., 2020)

Kasus beberapa daerah di Indonesia seperti Bangka Belitung, Kabupaten Banyuasin, Sulawesi Selatan, Jawa tengah, Yogyakarta, dan daerah lainnya memiliki permasalahan dalam pelaksanaan implementasi *e-Procurement* yaitu kinerja para pihak pengelolaan *e-Procurement* masih kurang maksimal. Hal ini karena ketidakpahaman dan ketidaksiapan sumber daya manusia dalam mengoperasikan *e-Procurement*, walaupun sudah diadakan pelatihan namun tetap belum dapat memberikan hasil yang maksimal. Berdasarkan tingkat efisiensi, Provinsi Bangka Belitung dalam pelaksanaan *e-Procurement* hanya sebesar 5,77% pada tahun 2012, jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai angka 11,44% (Aprizal & Purba, 2013; DP,M.K, 2016; Adrian et al., 2013; Sani et al., 2011; Udoyono, 2012). Bahkan, Kota Surabaya sebagai pelopor pertama yang menerapkan *e-Procurement* sejak tahun 2004 masih mengalami masalah serupa, sehingga terpaksa kembali menggunakan cara-cara manual dalam teknis pelaksanaannya (Novitaningrum, 2014).

Jawa Barat mulai mengimplementasikan *e-Procurement* sejak tahun 2007, bahkan Jawa Barat pernah mendapatkan penghargaan selama 6 tahun berturut-turut dari 2010-2015 (Septiawan, 2018). Suksesnya sistem PBJ berbasis elektronik di Jawa Barat ini ternyata masih belum semua kabupaten/kota yang menggunakan *e-Procurement* sebab terbatasnya keterampilan pada sumber daya manusia sebagai tenaga teknis (Hapiah et al., 2011). Berdasarkan data informasi yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (2021) menyatakan hanya 37% Perangkat Daerah/Biro di Jawa Barat yang sudah mencapai secara penuh sesuai pagu anggaran perubahan bahkan kurang dari 50% dari 46 Perangkat Daerah/Biro di Jawa Barat. Penyebabnya antara lain karena terdapat kendala dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) serta tingkat kesiapan sumber daya manusia untuk memahami teknologi, sehingga ada barang/jasa yang belum atau tidak tepat waktu dalam penginputan ke sistem LPSE serta disebabkan karena proses alur *website e-Procurement* sering dibilang rumit dilihat dari lebih banyak tahapan yang harus dilakukan dibandingkan secara konvensional.

Beberapa dinas kembali menerapkan PBJ secara konvensional atau manual untuk memudahkan penyedia dan pembeli bertemu langsung ketika melaksanakan lelang (Prihastuti, 2015). Maka dari itu ada 29 Perangkat Daerah/Biro di Jawa Barat yang dinyatakan belum sesuai pagu anggaran perubahan karena kendala tersebut. Hal ini membuat beberapa Perangkat Daerah/Biro di Jawa Barat rendah dalam

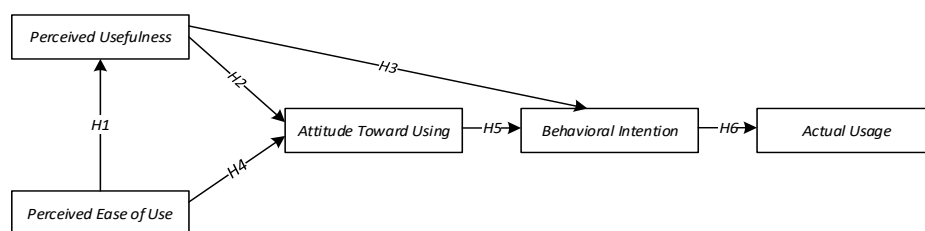
partisipasi penerapan *e-Procurement*. Salah satunya yaitu DISKOMINFO Jawa Barat yang masih kesulitan dalam proses pengolahan data penyedia (Azhar, 2011).

Jika dilihat dari permasalahan yang ada, implementasi *e-Procurement* di Jawa Barat belum berjalan secara efektif karena kurang didukung oleh kesiapan teknologi dan Sumber Daya Manusia. Kami ingin melihat tingkat kesiapan penggunaan teknologi dan Sumber Daya Manusia dalam menerapkan *e-Procurement* di Provinsi Jawa Barat.

METODE

Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dan deskriptif, dengan menguraikan fenomena yang terjadi sebelumnya menggunakan model *Technology Acceptance Model* (TAM). TAM merupakan sebuah model untuk mengetahui tingkat penerimaan pengguna terhadap teknologi. TAM pertama kali dikembangkan oleh Davis pada tahun 1986 dengan memunculkan variabel *Perceived Easy of Use* (Persepsi kemudahan penggunaan) dan *Perceived Usefulness* (persepsi kebermanfaatan). Kemudian dikembangkan lagi pada tahun 1996 oleh Davis bersama Venkateh dengan menambahkan variabel *Attitude Toward Using* (sikap terhadap penggunaan). Pada tahun 2001, Gahtani memodifikasi model TAM dengan menambahkan variabel *Behavioral Intention* (kecenderungan perilaku untuk tetap menggunakan) dan *Actual System Use* (penggunaan sistem informasi secara aktual) (Fatmawati, 2015).

Model ini kemudian diadopsi oleh Astuti pada tahun 2018 dengan menggunakan 5 konstruk TAM untuk mengukur tingkat penerimaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). Penelitiannya menggunakan model TAM paling lengkap untuk mengukur tingkat penerimaan sebuah sistem. Dengan demikian penulis ingin melihat pengaruh 5 konstruk TAM yang dapat mengukur penerimaan pengguna sistem *e-Procurement* di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Adapun pun model kontruk TAM yang akan digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 1. Model Penelitian
 Sumber: Astuti et al., 2016

Pengembangan Hipotesis Pengaruh *Perceived Ease of Use* (PEOU) terhadap *Perceived Usefulness* (PU)

Perceived Usefulness (Persepsi Kebermanfaatan) menggambarkan bagaimana seorang pengguna mempercayai sebuah sistem berdasarkan manfaatnya, bilamana

pengguna percaya sistem tersebut berguna maka tentu akan menggunakannya dan berlaku sebaliknya (Davis, 1986). Pernyataan ini diperkuat oleh penelitian Sitorus et al. (2015), menyatakan bahwa *Perceived Ease of Use* (PEOU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap konstruk *Perceived Usefulness* sistem *e-Procurement*. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi atas mudah tidaknya sistem *e-Procurement* digunakan berhubungan dengan tinggi rendahnya manfaat dari sistem *e-Procurement*.

H1: *Perceived Ease of Use* (PEOU) akan berpengaruh terhadap *Perceived Usefulness* (PU).

Pengembangan Hipotesis Pengaruh *Perceived Usefulness* (PU) Terhadap *Attitude Toward Using* (ATU)

Perceived Usefulness (PU) menggambarkan tingkatan dimana seseorang percaya bahwa pengguna *e-Procurement* dapat meningkatkan produktifitas kinerja seseorang (Davis, 1996). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penelitian (Sari et al. 2020), menyatakan bahwa *Perceived Usefulness* (PU) berpengaruh positif terhadap *Attitude Toward Using* (ATU). Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang semakin banyak memberikan manfaat atau kegunaan kepada pengguna akan mempengaruhi sikap pengguna untuk menggunakan sistem tersebut.

H2: *Perceived Usefulness* (PU) akan berpengaruh terhadap *Attitude Toward Using* (ATU).

Pengembangan Hipotesis Pengaruh *Perceived Usefulness* (PU) Terhadap *Behavioral Intention* (BI).

Tingkat penggunaan teknologi komputer seseorang dapat diprediksi dari sikap perhatiannya terhadap teknologi. Jika seorang pengguna merasa teknologi berguna maka penggunaannya akan meningkat. Beberapa penelitian sebelumnya telah menyebutkan bahwa *Perceived Usefulness* (PU) berpengaruh positif terhadap *Behavioral Intention* (BI), yaitu antara lain penelitian yang dilakukan oleh Bangkara et al., 2016; Sitorus et al, 2015.

H3: *Perceived Usefulness* (PU) akan berpengaruh terhadap *Behavioral Intention* (BI).

Pengembangan Hipotesis Pengaruh *Perceived Ease of Use* (PEOU) Terhadap *Attitude Toward Using* (ATU)

Persepsi kemudahan menggambarkan sejauh mana seseorang merasa mudah untuk menggunakan sistem tersebut dan tidak memerlukan banyak usaha dalam penggunaannya. Hal ini menjelaskan bahwa tujuan dan kemudahan penggunaan sistem sesuai dengan keinginan sikap seseorang dalam menggunakan sebuah sistem sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Hanggono, 2015).

H4: *Perceived Ease of Use* (PEOU) akan berpengaruh terhadap *Attitude Toward Using* (ATU).

Pengembangan Hipotesis Pengaruh *Attitude Toward Using* (ATU) Terhadap *Behavioral Intention* (BI)

Sikap seseorang dalam menggunakan sistem menunjukkan sejauh mana penilaian minatnya terhadap penggunaan teknologi akan berdampak pada keinginan perilaku sebab seseorang akan terlibat dalam suatu perilaku jika mereka memiliki keinginan atau minat di dalamnya. Hasil penelitian sebelumnya oleh Ilham (2017)

menunjukkan bahwa sikap pengguna berpengaruh positif terhadap minat perilaku pengguna karena minat perilaku merefleksikan sebuah keputusan yang telah dibuat oleh seseorang yang berhubungan dengan ketertarikan seseorang dalam menggunakan sistem *e-Procurement* .

H5: *Attitude Toward Using* (ATU) akan berpengaruh terhadap *Behavioral Intention* (BI).

Pengembangan Hipotesis Pengaruh *Behavioral Intention* (BI) Terhadap *Actual System Use* (AU)

Pengguna sistem merupakan tindakan nyata seseorang menggunakan teknologi informasi. Jika pengguna merasa puas akan manfaat dan kemudahan yang diberikan sistem maka akan mempengaruhi minat pengguna untuk menggunakan teknologi baru. Oleh karena itu, minat adalah indikator penting dari keinginan pengguna untuk menggunakan sistem (Rahmawati & Narsa, 2019)

H6: *Behavioral Intention* (BI) akan berpengaruh terhadap *Actual Usage* (AU).

Sumber Data

Penelitian ini dilakukan di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer. Data primer dikumpulkan melalui survei berupa penyebaran kuesioner dengan mengambil sampel dari 48 Dinas/OPD Provinsi Jawa Barat di bidang pengadaan barang dan jasa karena dapat mempresentasikan sistem *e-Procurement* di setiap pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Namun dalam pelaksanaan survei, hanya 27 Dinas/OPD yang bersedia sebagai partisipan dikarenakan tidak semua OPD melakukan kegiatan pengadaan serta tidak ada respon dari beberapa OPD dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden dengan ketentuan sebagai pengguna *e-Procurement*, sesuai dengan syarat pengolahan data menggunakan PLS SEM yaitu 30-100 ukuran (Chin, 2000). Kemudian untuk memperdalam hasil analisis dilakukan wawancara kepada 14 Dinas/OPD.

Analisis Data

Data di analisis menggunakan *Partial Least Square* SEM (PLS SEM). PLS SEM merupakan salah satu metode analisis kuantitatif dari *Structural Equation Modeling* (SEM). SEM mampu menjelaskan keterkaitan variabel secara langsung maupun tidak langsung. Kelebihan menggunakan PLS SEM yaitu sampel yang digunakan boleh sedikit serta tidak memerlukan data dengan distribusi normal (Sitorus et al., 2015). Adapun operasional data yang digunakan dengan PLS SEM melalui kuesioner yang telah disebarakan sebelumnya dengan skala *likert* 1-5 sebagai berikut:

Tabel 1. Operasional Variabel

No	Variabel/Konstruk	Sub Variabel	Indikator	Skala
1.	<i>Perceived Ease of Use</i> (PEOU) (Davis, 1986)	Mudah dipahami (PEOU1)	Pengguna belajar system <i>e-Procurement</i> melalui modul	<i>likert</i> (1-5)

	Flexibel (PEOU2)	<i>e-Procurement</i> dapat digunakan dimanapun dan kapanpun
	Terbebas dari kesulitan (PEOU3)	Terbebas kendala dalam sistem <i>e-Procurement</i>
2.	<p><i>Perceived Usefulness</i> (Davis, 1986)</p> <p>Meningkatkan produktivitas (PU1)</p> <p>Mempermudah pekerjaan (PU2)</p> <p>Efisien (PU3)</p>	<p>Meningkatkan hasil kerja yang baik dan mempercepat pekerjaan</p> <p><i>e-Procurement</i> memberi kemudahan dalam melakukan lelang</p> <p>Biaya melalui <i>e-Procurement</i> lebih murah</p>
3.	<p><i>Attitude Toward Using</i> (Venkatesh dan Davis, 1996)</p> <p>Memilih menggunakan (ATU1)</p> <p>Membantu dalam menggunakan (ATU2)</p>	<p>Memilih menggunakan melalui sistem dibandingkan manual</p> <p>Dukungan pemimpin dalam penerapan <i>e-Procurement</i></p>
4.	<p><i>Behavioral Intention</i> (Gahtani, 2001)</p> <p>Motivasi diri sendiri (BI1)</p> <p>Motivasi pengguna lain (BI2)</p>	<p>Motivasi untuk diri sendiri dalam menggunakan <i>e-Procurement</i></p> <p>Merekomendasikan dan memotivasi kepada orang lain untuk menggunakan <i>e-Procurement</i></p>
5.	<p><i>Actual Usage</i> (Gahtani, 2001)</p> <p>Kepuasan pengguna (AU1)</p> <p>Kenyamanan pengguna (AU2)</p>	<p>Pengguna merasa puas akan manfaat dan kemudahan yang diberikan <i>e-Procurement</i></p> <p>Sistem <i>e-Procurement</i> memberikan kenyamanan dalam hasil kerja</p>

Tabel 1 menggambarkan tujuan dari rumusan masalah pada penelitian ini. Variabel ini akan dianalisis dengan PLS SEM menggunakan *software SmartPLS 3.0*. Terdapat dua tahap pengukuran dalam *Partial Least Squares* (PLS) yakni *inner* model dan *outer* model.

Tahap Analisis

1. Tabulasi dengan mengelompokan responden melalui distribusi frekuensi dari setiap variabel yang diperoleh dari hasil kuesioner yang disebarakan sebelumnya untuk mengetahui skala range sebagai berikut:

1	2	3	4	5
0 – 20 % Sangat tidak setuju	21 – 40 % Tidak setuju	41 – 60 % Netral	61 – 80 % Setuju	81 – 100% Sangat Setuju

2. Validitas dan Reliabilitas (*Outer Model*)

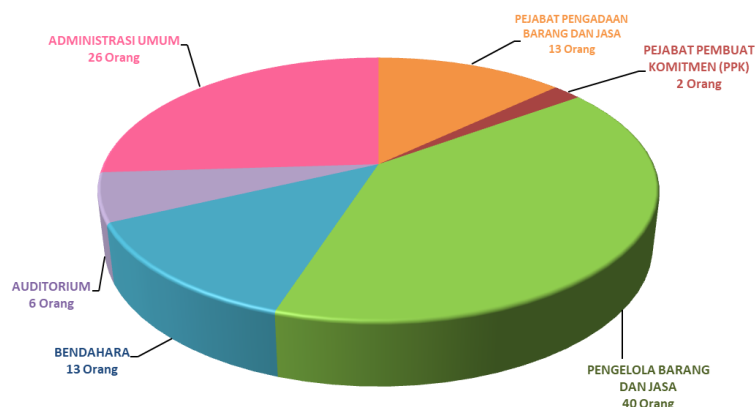
- a. Untuk melakukan pengujian validitas dilihat melalui nilai *loading factor* dari masing-masing indikator. Nilai *loading* harus diatas 0,70 supaya memenuhi syarat validitas berdasarkan nilai *loading*. Namun, untuk sistem yang masih dalam pengembangan, *loading factor* dapat dipertahankan pada nilai antara 0,50 dan 0,60
- b. Selanjutnya dilakukan pengujian validitas berdasarkan nilai *Average Variance Extracted (AVE)* dan reliabilitas berdasarkan *Cronbachs Alpha*, *Composite Reliability*. Kriteria dikatakan reliabel adalah nilai *composite reliability* atau *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,70 menunjukkan bahwa indikator yang digunakan sebagai konstruk atau variabel ukuran selalu bertindak sebagai ukuran nyata dari pengukuran struktural.
- c. Pengujian validitas diskriminan dengan pendekatan *Fornell-Larcker*, diukur melalui nilai akar kuadrat AVE dari suatu variabel laten, kemudian dibandingkan dengan nilai korelasi antara variabel laten tersebut dan variabel laten lainnya.

2. *Inner Model*

- a. Merancang *inner model*
 Perancangan inner model yang dibentuk berdasarkan model dari konstruk penelitian seperti yang terlihat di gambar 2.
- b. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan hasil perhitungan melalui *bootstrapping SmartPLS*. *Bootstrapping* merupakan pendekatan *non parametric* untuk mengestimasi ketepatan dari estimasi *Partial Least Square* (Chin, 2000).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini diawali dengan melakukan penyebaran kuesioner dan wawancara secara mendalam kepada 14 Dinas/OPD dan 100 responden sebagai partisipan. Kuesioner dibuat dengan konstruk *Technology Acceptance Model (TAM)* kemudian data diolah dan dihitung hasil rekapitulasi yang diperoleh dari kuesioner dengan *SmartPLS*. Berikut data 27 Dinas/OPD berdasarkan jabatan sebagai partisipan dalam penelitian ini:



Gambar 2. Partisipan Berdasarkan Jabatan
 Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Berdasarkan gambar 2, Dinas/OPD yang menjadi partisipan pada penelitian ini meliputi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Auditorium, Bendahara, Administrasi Umum, Pengelola Barang dan Jasa.

Kemudian data dianalisis statistika deskriptif untuk menjelaskan persentase distribusi frekuensi dari setiap variabel. Berdasarkan nilai persentase dari setiap variabel dan mengacu pada tabel 2 dapat dilihat bahwa variabel *Perceived Ease of Use* (PEOU) paling tinggi dalam kategori tidak setuju sebanyak 56%. Artinya masih ada pengguna yang kesulitan mengoperasikan *e-Procurement*.

Tabel 2. Persentase Distribusi Jawaban Responden

Variabel Laten	Tidak Setuju	Setuju
<i>Perceived Ease of Use</i> (PEOU)	56%	44%
<i>Perceived Usefulness</i> (PU)	21%	79%
<i>Attitude Toward Using</i> (ATU)	20%	80%
<i>Behavioral Intention to Use</i> (BI)	24%	76%
<i>Actual Usage</i> (AU)	28%	72%

Sumber: Data Diolah Primer, 2022

Tahap analisis statistika selanjutnya adalah membuat diagram jalur dan melakukan analisis PLS-SEM untuk menguji pengaruh antar variabel dan pengaruh indikator terhadap variabel latennya, baik pengaruh langsung maupun tidak langsung. Analisis awal pada PLS-SEM sebelum pengujian hipotesis guna memprediksi hubungan antar variabel laten dalam *inner model*, terlebih dahulu dilakukan validasi terhadap *outer model*.

Evaluasi Outer Model

Outer Model merupakan model yang menghubungkan variabel latent dengan indikator-indikator pertanyaan. Pengujian *outer model* dilakukan dengan melihat nilai validitas, reliabilitas konstruk dan *Average Variance Extracted* (AVE).

Tabel 3. Outer Model PLS SEM

	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
ATU	0,916	0,959	0,922
AU	0,878	0,942	0,891
BI	0,919	0,961	0,925
PEOU	0,829	0,892	0,733
PU	0,936	0,959	0,887

Sumber: Data Diolah Primer, 2022

Setelah diestimasi, pada tabel 3 diatas artinya bahwa model dapat dilakukan evaluasi ke tahap selanjutnya dikarenakan pada eksekusi nilai korelasi pada tiap-tiap indikator memiliki *loading factor* dan nilai *Cronbachs alpha* > 0.7 dari setiap konstruk, yang berarti telah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas.

Evaluasi Inner Model

Evaluasi inner model berfungsi untuk mengevaluasi hubungan antar variabel laten. Evaluasi ini meliputi signifikansi hubungan jalur sebagaimana yang dihipotesiskan dan melihat nilai *R-Square*. Evaluasi hubungan jalur dilihat berdasarkan *path coefficients*. Berikut hasil dari analisis *bootstraping* PLS SEM:

Tabel 4. Bootstraping Path Coefficient

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
ATU -> BI	0,330	0,326	0,147	2,240	0,026
BI -> AU	0,717	0,722	0,082	8,716	0,000
PEOU -> ATU	0,354	0,350	0,117	3,032	0,003
PEOU -> PU	0,302	0,313	0,114	2,655	0,008
PU -> ATU	0,379	0,371	0,135	2,803	0,005
PU -> BI	0,430	0,442	0,154	2,800	0,005

Sumber: Data Diolah Primer, 2022

Penelitian ini dinyatakan diterima karena nilai *P-Values* < 0.05 dan nilai *T-Statistic* semua hipotesis > 1,645.

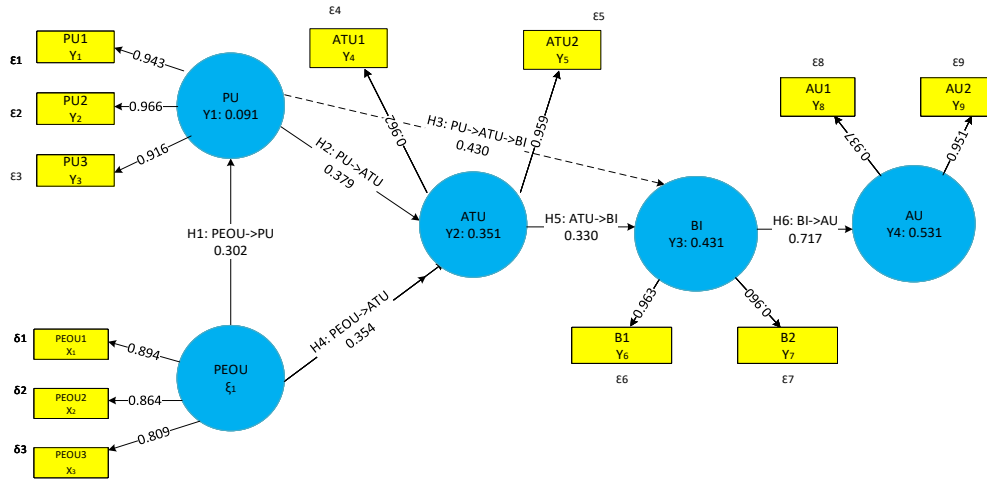
Tabel 6. Koefisien Determinasi

	R Square
ATU	0,351
AU	0,513
BI	0,431
PU	0,091

Sumber : Data Primer Diolah, 2022

Evaluasi selanjutnya terhadap *inner model* dengan melihat nilai *R-Square* pada konstruk endogen pada penelitian. Kriteria nilai *R-square* yang artinya bahwa model “baik”, *R-square* sebesar 0,33 “moderat”, dan *R-square* sebesar 0,19 model “lemah”. Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai *R-square* model penelitian ini masih antara lemah dan moderat yaitu diperoleh nilai *R-Square* PU 0,091. Hal ini menunjukkan bahwa konstruk PU sebesar 9,1% dapat dijelaskan oleh konstruk PEOU, sisanya 90,9% dijelaskan oleh variabel lain. Nilai ini mengindikasikan bahwa model lemah. Nilai *R-square* ATU sebesar 0,351 berarti ATU dijelaskan oleh konstruk PEOU dan PU sebesar 35,1%, sisanya 64,9% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model TAM, artinya nilai ini mengindikasikan bahwa model moderat. Nilai *R-Square* BI sebesar 0,431 yang menunjukkan bahwa konstruk BI dapat dijelaskan oleh konstruk PU dan ATU sebesar 43,1% sisanya 56,9% dipengaruhi oleh variabel lain. Nilai ini mengindikasikan bahwa model moderat. Nilai *R-Square* AU sebesar 0,513 yang menjelaskan bahwa konstruk AU dapat dijelaskan oleh konstruk BI sebesar 51,3% sisanya 48,7% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian. Nilai ini mengindikasikan bahwa model moderat.

Tahap analisis selanjutnya yaitu menganalisis diagram jalur yang telah diolah dengan *SmartPLS* untuk mengetahui hubungan pengaruh langsung dan tidak langsung. Berikut merupakan diagram jalur yang merepresentasikan *outer model* dan *inner model*.



Gambar 3. Diagram Jalur *Outer Model* dan *Inner Model*
 Sumber: Data Diolah Primer, 2022

Tabel 3. Simbol *Path Diagram*

Simbol	Deskripsi
●	Variabel laten
■	Indikator
→	Pengaruh langsung
- - - ->	Pengaruh tidak langsung

Konversi Diagram Jalur ke dalam Persamaan

Setelah diestimasi kemudian didapatkan persamaan model sebagai berikut:

Tabel 4. Persamaan Diagram Jalur

Variabel	Persamaan
<i>Perceived Ease of Use</i> (PEOU)	$X_1 = 0.894x_1 + d_1$
	$X_2 = 0.864x_1 + d_2$
	$X_3 = 0.809x_1 + d_3$
<i>Perceived Usefulness</i> (PU)	$Y_1 = 0.943h + e_1$
	$Y_2 = 0.966h + e_2$
	$Y_3 = 0.916h + e_3$
<i>Attitude Toward Using</i> (ATU)	$Y_4 = 0.962h + e_4$
	$Y_5 = 0.959h + e_5$
<i>Behavioral Intention to Use</i> (BI)	$Y_6 = 0.963h + e_6$
	$Y_7 = 0.960h + e_7$
<i>Actual Usage</i> (AU)	$Y_8 = 0.937h + e_8$

	$Y_9 = 0.951h + e_7$
--	----------------------

Dengan persamaan diatas dapat diketahui pengaruh indikator mana yang paling besar berpengaruh terhadap variabel latennya sehingga dapat memberikan masukan untuk meningkatkan indicator yang masih lemah berpengaruhnya.

Pengaruh *Perceived Ease of Use* (PEOU) terhadap *Perceived Usefulness* (PU)

Ditengah keberhasilan *e-Procurement* di Pemerintah Provinsi Jawa Barat, faktanya masih terdapat kendala yang dirasakan oleh pengguna khususnya pada persepsi kemudahan (PEOU). Pada tabel 5 menunjukkan bahwa PEOU terhadap PU memiliki pengaruh langsung paling kecil yaitu 0,302. Sesuai dengan masih banyaknya keluhan mengenai teknis pelaksanaan *e-Procurement* di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Diperkuat dengan hasil kuesioner bahwa 56% pengguna merasa kesulitan mengoperasikan *e-Procurement*. Kemudian berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa mayoritas pengguna merasakan kesulitan diantaranya mereka sulit dalam mempelajari modul *e-Procurement* akibatnya akan mempengaruhi pemahaman pengguna sistem tersebut. Padahal jika dilihat dari persamaan pada tabel 4 menunjukkan bahwa indikator yang memiliki pengaruh paling besar terhadap variable PEOU yaitu x1 atau indikator yang mengukur kemudahan pengguna mempelajari modul *e-Procurement*. Kesulitan lainnya yaitu sering terjadi *server down* ketika mencapai batas waktu penyerahan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan proses pembayaran yang dinilai kurang praktis sehingga memperlambat produktivitas pengguna, hal tersebut karena dampak dari fitur *e-Procurement* yang tidak lengkap seperti tidak memiliki *virtual account*, akibatnya pengguna harus transfer secara langsung ke penyedia dan melakukan pencatatan secara manual sehingga semakin banyak tahapan yang harus dilakukan membuat beberapa Dinas/OPD mengalami keterlambatan dalam penyerahannya. Lebih jelasnya hubungan variabel dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5. Koefisien Jalur, Pengaruh Langsung, Pengaruh Total, dan Pengaruh Parsial Dari *Perceived Ease of Use* (PEOU)

Variabel Koefisien Jalur		X1	€1	
Pengaruh	Langsung	0,302	0,909	X1 -> Y1
	Total	0,302	$\sqrt{1 - 0,091} =$	
Pengaruh Parsial		-	-	9,1%

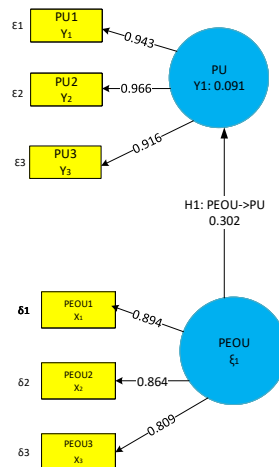
Sumber: Data Diolah Primer, 2022

Keterangan :

X1 = *Perceived Ease of Use* (PEOU)

Y1 = *Perceived Usefulness* (PU)

Hubungan kausal empiris antara *Perceived Ease of Use* (PEOU) terhadap *Perceived Usefulness* (PU) dapat dijelaskan pada diagram jalur berikut ini:



Gambar 4. Diagram Jalur Hubungan Kausal Empiris (PEOU → PU) ➔
Pengaruh *Perceived Usefulness* (PU) Terhadap *Attitude Toward Using* (ATU)

Meskipun terdapat kesulitan, mereka mengakui ada manfaat besar yang diberikan *e-Procurement* dan berpengaruh pada sikap pengguna untuk tetap menggunakan system tersebut, sesuai dengan yang ada pada tabel 6 bahwa pengaruh PU terhadap ATU sebesar 0.379 lebih besar dibandingkan dengan pengaruh PEOU terhadap PU. *e-Procurement* bermanfaat karena dapat meningkatkan produktifitas, mencegah korupsi, serta proses pengadaan barang dan jasa akan lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien (Septiawan, 2018). Adapun informasi yang diperoleh dari hasil kuesioner yaitu sebanyak 79% pengguna merasa bahwa *e-Procurement* memberikan manfaat yang besar, namun berdasarkan wawancara diperoleh informasi bahwa hanya manfaat mengenai biaya efisien yang masih belum dirasakan pengguna. Beberapa Dinas/OPD menganggap pembelian barang/jasa di *e-Procurement* tidak efisien karena pengguna mengalami permasalahan terkait harga yang diajukan oleh penyedia. Hal ini berbanding terbalik dengan Perpres No 16 Tahun 2018 yang menekankan menggunakan *e-Procurement* untuk mengefesien biaya dan waktu. Harga yang mahal dan masih sedikit vendor yang tersedia di aplikasi *e-Procurement* membuat Dinas/OPD memilih belanja kebutuhannya di *e-commerce* seperti *shopee*, *tokopedia* dan lainnya atau berbelanja secara *offline*. Menurut informan, beberapa penyedia sulit diajak bergabung ke *e-Procurement* karena regulasi yang rumit dan harga pasar yang sulit disesuaikan dengan perbedaan harga di setiap daerah sehingga pada beberapa kondisi, harga yang tertera di *e-Procurement* lebih mahal dibandingkan dengan di pasaran untuk spesifikasi barang yang sama. Ketidaknyamanan tersebut mempengaruhi keefektifan *e-Procurement* sehingga beberapa Dinas/OPD masih ada yang memilih melakukan transaksi barang/jasa diluar *e-Procurement*.

Saat ini untuk mengatasi permasalahan, upaya pemerintah yang sedang dilakukan adalah mendorong LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa) untuk mengajak penjual/penyedia menjual produk UMKM dan Ultra Mikro (UMi) dengan mendaftarkan produknya dalam *e-Procurement* serta Kementerian Kominfo akan memberikan dukungan kepada LKPP melalui infrastruktur teknologi informasi seperti *digital payment*, dengan memanfaatkan *QR Indonesian Standar* yang

diterbitkan Bank Indonesia sebagai alat dan mekanisme pembayaran digital untuk mempermudah transaksi belanja di *e-Procurement*, sehingga pelayanan dalam pelelangan melalui *e-Procurement* dapat berjalan dengan lancar (Netralnews.com, 2022). Dengan demikian, pemanfaatan yang optimal dan pengembangan *e-Procurement* di pemerintah Provinsi Jawa Barat yang luas dengan membuka peluang persaingan usaha yang kompetitif, sehat, serta wajar akan berdampak pada keputusan seseorang untuk tetap menggunakan sebuah sistem, meskipun *e-Procurement* dalam pengoperasiannya sulit tetapi manfaat yang diberikan besar maka pengguna akan menerima sistem tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Hanggono, 2015; Bappelitbangda.go.id). Lebih jelasnya hubungan variabel dapat dilihat pada tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6. Koefisien Jalur, Pengaruh Langsung, Pengaruh Total, dan Pengaruh Parsial Dari *Attitude Toward Using (ATU)*

Variabel Koefisien Jalur		Y1	€2	
Pengaruh	Langsung	0,379	0,649	Y1 -> Y2
	Total	0,379	$\sqrt{1 - 0,351} = 0,649$	
Pengaruh Parsial		-	-	35,1%

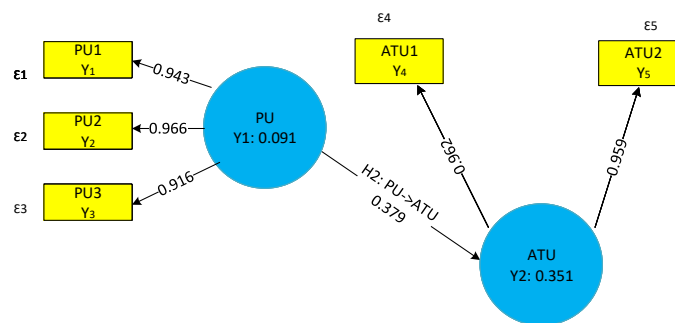
Sumber: Data Diolah Primer, 2022

Keterangan :

Y1 = *Perceived Usefulness (PU)*

Y2 = *Attitude Toward Using (ATU)*

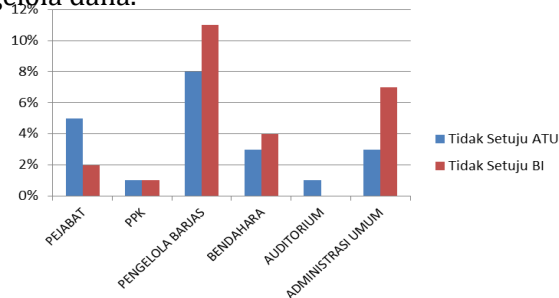
Hubungan kausal empiris antara *Perceived Usefulness (PU)* terhadap *Attitude Toward Using (ATU)* dapat dijelaskan pada diagram jalur berikut ini:



Gambar 5. Diagram Jalur Hubungan Kausal Empiris (PU → ATU) ➔ **Pengaruh *Perceived Usefulness (PU)* Terhadap *Behavioral Intention (BI)*.**

Disamping manfaat yang besar, mereka tetap memilih menggunakan *e-Procurement* karena secara sistem pengguna dipaksakan untuk bisa menggunakannya meskipun tidak mempertimbangkan ketertarikan pengguna terhadap system, terlihat pada tabel 7 bahwa pengaruh ATU terhadap BI sebesar 0,330 lebih kecil dibanding pengaruh PEOU dan PU terhadap ATU. Sikap seseorang dalam menggunakan sistem akan mempengaruhi ketertarikan pengguna terhadap sistem tersebut. Ketika terjadi masalah dalam penggunaan *e-Procurement* maka akan

membuat pengguna mempertimbangkan sikapnya untuk menggunakan sistem tersebut karena rasa ketertarikan akan meningkat jika pengguna terbebas dari masalah penggunaan. Pada gambar 4 menunjukkan rasa tidak suka paling tinggi dalam penggunaan yaitu Pengelola PBJ sebagai pelaksana pelelangan yang berkaitan langsung dengan penyedia, Administrasi Umum sebagai pencatatan transaksi, dan Bendahara sebagai pengelola dana.



Gambar 4. Persentase BI dan ATU Berdasarkan Jabatan

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Berdasarkan temuan dilapangan, pengguna mengakui bahwa sistem *e-Procurement* sulit untuk dipahami, disamping manfaat yang besar memang sebaiknya Dinas/OPD memakai aplikasi *e-Procurement*. Dampak dari permasalahan pada persepsi kemudahan dan persepsi manfaat seperti harga yang diajukan penyedia terlalu mahal dan masih sedikitnya vendor yang tersedia pada aplikasi *e-Procurement* membuat pengguna memilih belanja diluar aplikasi dan melakukan pencatatan secara manual. Hal ini menjadi peluang timbulnya masalah seperti kekeliruan dalam pencatatan riwayat transaksi yang berpengaruh pada transparansi dan akuntabilitas *e-Procurement* sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Novitaningrum, 2014). Apabila permasalahan tersebut dibiarkan maka akan mengurangi minat dalam menggunakan *e-Procurement*.

Menurut informan dari hasil wawancara secara mendalam, pengguna *e-Procurement* kehilangan minat menggunakan *e-Procurement* karena proses pengajuan dan persetujuan untuk pemesanan barang/jasa memakan waktu cukup lama, sementara pengguna membutuhkan barang/jasa lebih cepat serta tidak semua barang yang dibutuhkan tersedia di *e-Procurement*. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada salah satu Pejabat PBJ, beliau berpendapat bahwa ada kekurangan saat belanja secara *online* karena spesifikasi barang yang diterima tidak sesuai dengan yang ada di *e-Procurement* sehingga ada rasa ketidakpuasan yang menyebabkan pengguna memilih belanja secara *offline*. Lebih jelasnya hubungan variabel dapat dilihat pada tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7. Koefisien Jalur, Pengaruh Langsung, Pengaruh Total, dan Pengaruh Parsial Dari *Behavioral Intention to Use* (BI)

Variabel Koefisien Jalur		Y2	€3	
Pengaruh	Langsung	0,430	0,659	Y1 -> Y2->Y3

	Total	0,430	$\sqrt{1 - 0.431} = 0,659$	
Pengaruh Parsial		-	-	43,1%

Sumber: Data Diolah Primer, 2022

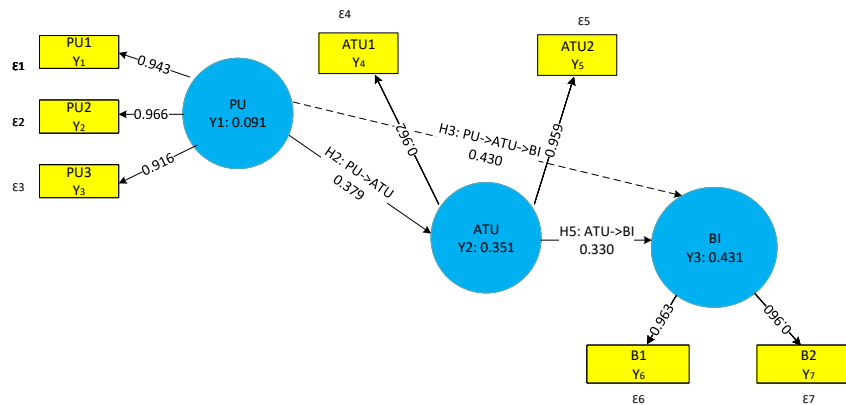
Keterangan :

Y1= *Perceived Usefulness* (PU)

Y2 = *Attitude Toward Using* (ATU)

Y3 = *Behavioral Intention to Use* (BI)

Hubungan kausal empiris antara *Perceived Usefulness* (PU) terhadap *Behavioral Intention to Use* (BI) melalui *Attitude Toward Using* (ATU) dapat dijelaskan pada diagram jalur berikut ini:



Gambar 6. Diagram Jalur Hubungan Kausal Empiris (PU → ATU → BI) → *Perceived Ease of Use* (PEOU) Terhadap *Attitude Toward Using* (ATU)

Permasalahan yang telah di uraikan diatas, membuat seseorang mempertimbangkan keputusannya untuk menggunakan system tersebut. Terlebih kesulitan yang dirasakan pengguna mempengaruhi sikap sebesar 0.354 lebih kecil dari hubungan PU terhadap ATU. Artinya, persepsi kemudahan masih rendah dalam mempengaruhi sikap pengguna, namun jika dilihat dari manfaat maka pengguna akan mempertimbangkan untuk tetap menggunakan system. Terlihat dari hasil persentase kuesioner bahwa sebanyak 80% pengguna sudah memilih menggunakan *e-Procurement*, namun 20% pengguna lainnya lebih memilih kegiatan PBJ dilakukan secara manual, karena kesulitan dan pemanfaatan yang belum optimal seperti harga yang diajukan penyedia terlalu mahal dan masih sedikitnya vendor yang tersedia pada aplikasi *e-Procurement* membuat pengguna memilih belanja diluar aplikasi dan melakukan pencatatan secara manual. Apabila permasalahan tersebut dibiarkan maka akan mempengaruhi sikap pengguna dalam menggunakan *e-Procurement*. Seiring seseorang menyadari adanya manfaat pada sebuah system maka akan menunjukkan wujud nyata adopsi layanan ini dengan terus menggunakannya untuk berbagai transaksi barang/jasa secara *online*. Lebih jelasnya hubungan variabel dapat dilihat pada tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 8. Koefisien Jalur, Pengaruh Langsung, Pengaruh Total, dan Pengaruh Parsial Dari *Attitude Toward Using* (ATU)

Variabel Koefisien Jalur		Y1	€2	
Pengaruh	Langsung	0,354	0,649	X1 -> Y2
	Total	0,354	$\sqrt{1 - 0,351} =$ 0,649	
Pengaruh Parsial		-	-	35,1%

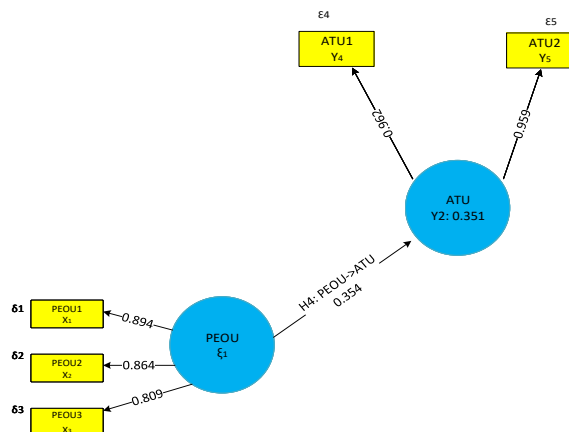
Sumber: Data Diolah Primer, 2022

Keterangan :

Y1 = *Perceived Usefulness* (PU)

Y2 = *Attitude Toward Using* (ATU)

Hubungan kausal empiris antara *Perceived Usefulness* (PU) terhadap *Attitude Toward Using* (ATU) dapat dijelaskan pada diagram jalur berikut ini:



Gambar 7. Diagram Jalur Hubungan Kausal Empiris (PEOU → ATU) terhadap *Behavioral Intention* (BI) terhadap *Actual Usage* (AU)

Minat sebagai indikator penting dari keinginan untuk menggunakan sistem, Jika pengguna merasa puas dengan manfaat dan kemudahan yang diberikan sistem *e-Procurement* maka akan mempengaruhi minat pengguna untuk tetap menggunakan sistem tersebut. Pada tabel 9 terlihat bahwa minat pengguna terhadap pengguna nyata (AU) memiliki pengaruh langsung paling tinggi diantara variabel lainnya yaitu 0,717. Artinya kenyataan bahwa pengguna memiliki minat yang tinggi timbul karena adanya kemudahan dan manfaat yang dirasakan pengguna sehingga akan mendorong pengguna untuk terus mempertahankan penggunaannya (AU). Berdasarkan hasil presentase kuesioner sebanyak 72% pengguna menerima system *e-Procurement* dan 28% pengguna lainnya menolak hadirnya *e-Procurement*. Hasil temuan dilapangan menjelaskan alasan pengguna sebanyak 28% menolak hadirnya *e-Procurement* karena adanya kesulitan yang membuat pengguna kurang nyaman dalam penggunaan system tersebut.

Untuk meningkatkan kepuasan pengguna dalam menggunakan system *e-Procurement* diperlukan dukungan dari pemerintah untuk mendorong Dinas/OPD supaya mengikuti arahan yang diberikan oleh pemerintah demi terciptanya tata kelola PBJ yang lebih baik sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2020-2024 tentang capaian indikator tata kelola PBJ yang masih sangat perlu untuk ditingkatkan (Kalbarprov.go.id). Hal ini pun sejalan dengan pandangan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Sumber Daya Air, dan Dinas Kehutanan melalui hasil wawancara, bahwa peran pemerintah pusat penting dalam mempersiapkan kebijakan dan teknis pelaksanaan yang lebih matang serta mempersiapkan pelatihan dan pembinaan untuk Dinas/OPD bagi yang masih mengalami kesulitan dalam mengoperasikan *e-Procurement*, karena suksesnya sistem PBJ berbasis elektronik di Jawa Barat ini tidak terlepas dari Sumber Daya Manusia yang kompeten. Hal ini juga menjadi temuan dalam penelitian Rahmawati et al. (2019) bahwa semakin tinggi kecenderungan menggunakan sistem *e-Procurement* maka akan semakin tinggi pula kenyataan penggunaannya, meskipun pada penerapannya pengguna tidak selalu memberikan keinginan untuk terus menggunakan maupun merekomendasikan kepada pihak lain.

Demi terwujudnya keberhasilan pelaksanaan *e-Procurement* yang lancar, Dinas/OPD di Provinsi Jawa Barat berharap pemerintah pusat memberikan pelatihan dan pembinaan secara berkala, memperbaiki regulasi yang rumit, dan fitur sistem *e-Procurement* yang mudah dipahami, peningkatan kuantitas dan kompetensi SDM sebagai pengguna maupun penyedia, serta memperbaiki sistem tender dengan menambah penyedia/penjual di sistem *e-Procurement* yang lebih murah dengan memasukan *e-commerce* seperti shopee, lazada, tokopedia, dan lainnya. Lebih jelasnya hubungan variabel dapat dilihat pada tabel 9 sebagai berikut:

Tabel 9. Koefisien Jalur, Pengaruh Langsung, Pengaruh Total, dan Pengaruh Parsial Dari *Actual Usage* (AU)

Variabel Koefisien Jalur		Y2	€4	
Pengaruh	Langsung	0,717	0,469	Y4 -> Y5
	Total	0,717	$\sqrt{1 - 0.531} =$ 0,469	
Pengaruh Parsial		-	-	53,1%

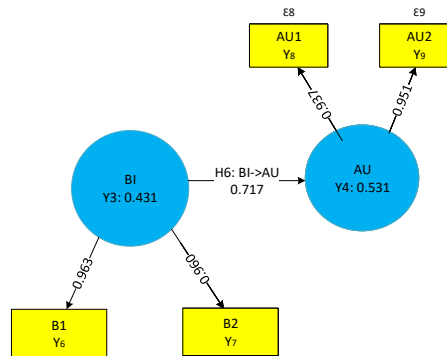
Sumber: Data Diolah Primer, 2022

Keterangan :

Y4 = *Behavioral Intention to Use* (BI)

Y5 = *Actual Usage* (AU)

Hubungan kausal empiris antara *Behavioral Intention to Use* (BI) terhadap *Actual Usage* (AU) dapat dijelaskan pada diagram jalur berikut ini:



Gambar 8. Diagram Jalur Hubungan Kausal Empiris (BI AU) →

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi pengguna *e-Procurement* di Dinas/OPD Provinsi Jawa Barat yang diukur menggunakan model TAM (*Technology Acceptance Model*) diantaranya variabel *Perceived Easy of Use* (PEOU), *Perceived Usefulness* (PU), *Attitude Toward Using* (ATU), *Behavioural Intention* (BI), dan *Actual Use* (AU) menunjukkan pengaruh yang paling besar yaitu minat perilaku untuk menggunakan (BI) terhadap pengguna sistem secara aktual (AU). Sedangkan, dalam tingkat penerimaan minat perilaku (BI) masih rendah sehingga mempengaruhi pengguna sistem secara aktual (AU).

Namun demikian, pengguna sistem sebesar 69% telah menerima hadirnya *e-Procurement* yang artinya pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu meningkatkan lagi 31% tingkat penerimaan *e-Procurement* secara merata melalui perbaikan sistem dan meningkatkan kompetensi SDM guna mewujudkan optimalisasi *e-Procurement* di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang dilakukan, dapat diperoleh strategi untuk meningkatkan penerimaan *e-Procurement* yaitu sebagai berikut:

1. Melengkapi fitur sistem yang tidak lengkap dengan mengajak penjual/penyedia menjual produk UMKM dan Ultra Mikro (UMi) untuk mendaftarkan produknya agar tersedia di *e-Procurement*.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM agar dapat menguasai *e-Procurement* melalui pelatihan dan pembinaan secara berkala.
3. Menyederhanakan regulasi yang rumit sehingga akan mendorong minat pengguna/penyedia menggunakan *e-Procurement*.
4. Meningkatkan persaingan harga yang sehat untuk mendapatkan harga yang disepakati lebih efisien.
5. Melakukan pengawasan dan peningkatan kapasitas jaringan untuk mengatasi masalah *server down* dan masalah keterlambatan input RUP (Rencana Umum Pengadaan) sehingga *e-Procurement* dapat berjalan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ada, Y., Kalangi, L., & Warongan, J. D. (2020). Analisis Pengawasan Inspektorat Daerah Terhadap Pelaksanaan *e-Procurement* Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"*, 11(2).
- Adrian, R., Lituhayu, D., & Djumiarti, T. (2013). Implementasi Pelaksanaan *E-Procurement* Dengan Prinsip-prinsip *Good Governance* Di Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Public Policy and Management Review*, 2(3), 263-272.

- Aprizal, A., & Purba, J. R. T. (2013). Akuntabilitas pelayanan publik dalam pelaksanaan *E-Procurement* di Kota Pangkalpinang. JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik), 17(1), 15-28.
- Astuti, R. D. (2016). Analisis Pemanfaatan Jurnal Online Open Journal System (Ojs) Menggunakan Metode *Technology Acceptance Model* (TAM) (Studi Kasus: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Azhar, F. (2011). *E-Procurement* Berbasis Intranet Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Barat (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- Azikin, A., Ismail, I., & Aminah, S. (2021). Evaluasi Pelaksanaan *Probit Audit* Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah pada Kantor Inspektorat Kabupaten Soppeng. Jurnal Ada Na Gau:Public Administration, 2(1), 481-490.
- Badan Siber dan Sandi Negara. (2021). Dokumen Input SIRUP Perubahan.
- Bangkara, R. P., & Mimba, N. P. S. H. (2016). Pengaruh *Perceived Usefulness dan Perceived Ease of Use* pada minat penggunaan *internet banking* dengan *Attitude Toward Using* sebagai variabel *intervening*. E-Jurnal Akuntansi, 16(3), 2408-2434.
- Bappelitbangda.go.id. (2020). Pemda Provinsi Jabar Gandeng Mbizmarket dalam Digitalisasi Pengadaan Barang dan Jasa. <https://bappelitbangda.purwakartakab.go.id/read/443965>. [diakses 19 Januari 2020].
- Chin WW. 2000. *Partial Least Squares for Researcher: An Overview and Prosentation of Recent Advances Using the PLS Approach*, <http://discnt.cba.uh.edu/chin/icis96.pdf> [20 Maret 2022].
- Davis, Fred D. 1986. "*Perceived Usefulness, Perceived Ease Of Use, and User Acceptance of Information Technology.*" MIS Quarterly, September, vol.13, No.3 p.319-340 dalam <http://www.jstor.org>
- DP, M. K. (2016). Pengaruh Pimpinan Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pegawai Dalam Pelaksanaan *E-Procurement* Di Kabupaten Banyuasin. Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini, 7(2), 44-51.
- Endah, K. (2018). Etika Pemerintahan dalam Pelayanan Publik. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 4(1), 141-151.
- Fatmawati, E. (2015). *Technology Acceptance Model* (TAM) untuk menganalisis penerimaan terhadap sistem informasi di perpustakaan. M Informasi Perpustakaan. Iqra: Jurnal Perpustakaan dan Informasi, 9(1), 196942.
- Gahtani, S.A. 2001. "*The Applicability of TAM Outside North American: an Empirical Test in United Kingdom.*" *Information Resource Management Journal*, p.37-46.
- Hanggono, A. A. (2015). Analisis atas praktek TAM (*Technology Acceptance Model*) dalam mendukung bisnis *online* dengan memanfaatkan jejaring sosial Instagram (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

- Hapiah, Y. (2011). Analisis Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik (*E-Procurement Government*) Di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmu*
- Ilham, M. (2017). Analisis Model Penerimaan Teknologi Pada Wajib Pajak Dalam Menggunakan Sistem *E-Billing* Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Merauke. *Jurnal Mantik Penusa*, 21(1).
- Kalbarprov.go.id. (2022). Perbaikan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Yang Bersih Melalui *Smart E-Procurement*. <https://kalbarprov.go.id/berita/perbaikan-tata-kelola-pengadaan-barangjasa-yang-bersih-melalui-smart-e-procurement.html> [diakses 1 Juni 2022].
- Lpse.jabarprov.go.id, 2011
- Lpse.lkpp.go.id, 2009
- Moento, P. A., Firman, F., & Yusuf, A. P. (2019). *Good governance*. Dalam *Pemerintahan*. *Musamus Journal of Public Administration*, 1(2), 10-16.
- Netralnews.com (2022). Dukung E-Katalog LKPP, Kominfo Siapkan Aplikasi, Bandwith, dan PusatData. <https://www.netralnews.com/dukung-e-katalog-lkpp-kominfo-siapkan-aplikasi-bandwith-dan-pusat-data/az> [diakses 26 Maret 2022]
- Novitaningrum, B. D. (2014). Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui *Electronic Procurement (Best Practice* di Pemerintah Kota Surabaya). *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* ISSN.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- Prihastuti, N. E. (2015). Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Elektronik (*E-Procurement*) Di Dinas Pekerjaan Umum. Provinsi Papua (Doctoral dissertation, Institut Technology Sepuluh Nopember).
- Purba, H. R. C., & Arifin, Z. (2020). Implementasi Pengadaan Barang Atau Jasa Pemerintah Dalam Perpres Nomor 4 Tahun 2015 (Studi di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk). *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 64-71.
- Rachmania, S. N. (2020). Kesalahan Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Berimplikasi Tindak Pidana. *Jurist- Diction*, 3(3), 1123-1152.
- Rahmawati, R. N., & Narsa, I. M. (2019). Penggunaan *e-learning* dengan *Technology Acceptance Model (TAM)*. *Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan*, 6(2), 127-136
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta.
- Sani, A. (2011). Evaluasi Penerapan *E-Procurement* pada Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan (*Doctoral dissertation*, Universitas Hasanuddin).

- Sari, D. R. (2021). Pengaruh Dimensi Budaya Terhadap Tingkat Penerimaan Masyarakat Pada Layanan *E-filing*: Analisis *Technology Acceptance Model* (TAM). *JST (Jurnal Sains Terapan)*, 7(2), 7-14.
- Sari, D. R., & Sorongan, E. (2020). Adopsi Dimensi Budaya Pada Model Penerimaan Teknologi: Studi Literatur. *Prosiding Snitt Poltekba*, 4, 101-105.
- Septiawan, B. (2018). Keberhasilan implementasi sistem *E-Procurement* pada Pemerintah Daerah se- Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 2(1), 23-40.
- Sitorus, E., Rosidi, A., & Sunyoto, A. (2015). Analisis dan Evaluasi *User Acceptance* terhadap Penerapan *E-Procurement* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. *ComPutarE: Jurnal Ilmiah Information Technology*, 3(1), 10-23.
- Udoyono, K. (2012). *E-Procurement* dalam Pengadaan Barang dan Jasa untuk Mewujudkan Akuntabilitas di Kota Yogyakarta. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 3(1).
- Venkatesh, V., & Davis, F. D. (1996). *A model of the antecedents of perceived ease of use: Development and test*. *Decision sciences*, 27(3), 451-481.
- Wardhana, P. H. K. (2016). Pelaksanaan Administrasi Pengeluaran Kas Untuk Alat Tulis Kantor (Atk) Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Jember.
- World Bank. 2001. *Indonesia Country, Procurement Assessment Report, Reforming the Public Procurement System*. Jakarta: *East Asia and Pacific Region Operational Services Unit World Bank Office*.